



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024

I. Pendahuluan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 disusun sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat atas pelaksanaan tugas pemerintahan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam pelaksanaan Tahun Anggaran 2024. Laporan ini mencakup kegiatan dan hasil yang dicapai dalam periode tahun 2024.

II. Profil Pemerintah Daerah

Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan bagian paling timur dari Propinsi Kalimantan Barat, dengan luas wilayah 31.318,246 km² dan jumlah penduduk pada tahun 2024 sebanyak 276.988 jiwa, dengan kepadatan penduduk 8,84 jiwa/km²,

Secara administratif Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari 23 kecamatan dan 278 desa dan 4 kelurahan. Pemerintah daerah dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati serta DPRD yang berfungsi sebagai lembaga legislatif.

III. Kinerja Pemerintah Daerah

Pada tahun 2024, pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan berbagai program prioritas yang mencakup penyelenggaraan program pemerintah, pemerintah daerah dan pihak swasta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengukuran indikator kinerja makro tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita dan Ketimpangan Pendapatan dengan capaian sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1
Capaian Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Laju Kinerja
1	Indeks Pembangunan Manusia	67,86	68,77	1,341
2	Angka Kemiskinan	8,16	7,4	-9,314
3	Angka Pengangguran	2,19	2,18	-0,457
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,61	4,75	3,037
5	Pendapatan Per Kapita	50092	53963	7.728
6	Ketimpangan Pendapatan	0,299	0,299	0

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

1. CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian kinerja urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, yang mencakup :

1.1. Urusan Pendidikan

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian Kinerja urusan pendidikan yang diperoleh Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SUMBER DATA	KET
1.	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yg berpartisipasi dlm PAUD	68,225 %	79,596%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	95,503%	94,841%		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 th yg berpartisipasi dlm pendidikan menengah pertama	94,532%	95,273%		



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SUMBER DATA	KET
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yg belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yg berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1,428%	5,988%		

B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Persentase
Belanja Operasi	420.954.584.995,00	412.599.862.869,00	98,02

C. Permasalahan Yang Dihadapi

- Secara geografis wilayah Kabupaten Kapuas Hulu cukup luas yang terdiri dari 23 Kecamatan.
- Secara akses infrastruktur jalan masih minim dan masih ada wilayah yang belum terakses oleh jalan yang baik.
- Sumber dana pembangunan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan kemampuan keuangan bersumber dari APBD belum dapat secara optimal / terbatas
- Sumber daya aparatur terbatas

1.2. Urusan Kesehatan

A. Capaian Kinerja Outcome

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SUMBER DATA	KET
2.	Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan Kabupaten	1,255	1,018		
		Persentase Rumah Sakit Rujukan Terakreditasi	100 %	100%		
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	60,992 %	63,948%		
		Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	72,058 %	87,772%		



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SUMBER DATA	KET
		Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	80,679 %	96,217%		
		Cakupan Pelayanan kesehatan Balita sesuai Standar	64,905%	74,494%		
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	97,182%	92,227%		
		Persentase Orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	97,957%	90,339%		
		Persentase Warga Negara usia 60 tahun keatas yg mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	80,623%	81,256%		
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	81,427%	92,213%		
		Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	100%		
		Persentase ODGJ berat yg mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%		
		Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%		
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100%		

B. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Persentase
Pendaptan Asli Daerah	33.447.073.580,00	35.564.371.719,63	106,33%
Belanja Operasi	252.527.640.514,00	240.899.688.611,07	95,40
Belanja Modal	17.436.204.434,00	17.297.283.341,00	99,20

C. Permasalahan Yang Dihadapi

1. Data dari Puskesmas sering terjadi keterlambatan pengumpulan yang ditetapkan tanggal 10 masih belum terkumpul semua sehingga menghambat terkumpulnya data ditingkat Dinas Kesehatan.
2. Penentuan sasaran masih menggunakan data Pusdatin kementerian kesehatan yang angkanya jauh tinggi dibandingkan dengan data capaian riil 3 tahun terakhir terutamanya sasaran ibu hamil . sehingga untuk mencapai target masih jauh dari mencapai 100%.
3. Pelaksanaan Kegiatan tidak sesuai dengan rencana yang disusun, RUK yg disusun dalam 1 tahun kemudian dijabarkan melalui RPK tahunan dan diturunkan menjadi RPK bulanan belum konsisten dilaksanakan sesuai RPK bulanan. Untuk setiap SPM belum semuanya dianggarkan sesuai dengan sasaran , sebagian masih bersumber dari dana DAK non fisik, BOK Kabupaten dan Puskesmas. Dalam penyusunan rincian menu dan rincian menu didalam erenggar yang dimappingkan didalam SIPD belum dimappingkan dalam sub kegiatan yang mendukung SPM Pencatatan dan laporan yang belum tertib.
4. Untuk skrining pelayanan kesehatan usia produktif alat Glucometer masih kurang 350 buah, Kit IVA tes kurang 2 kit, strip dan reagen HB masih kurang 6.408 strip, Kit Ophthalmologi kurang 21 kit dan Kuisioner PUMA 47.571 lembar, Vaksin Tetanus Difteri (Td) dari Dinkes prov masih kosong Untuk pelayanan kesehatan hipertensi obat masih kurang dibandingkan jumlah sasaran, tenaga Gizi di Puskesmas masih kurang 24 orang Untuk skrining pelayanan DM alat Glucometer masih kurang 350 buah, obat DM masih kurang, tenaga Gizi di Puskesmas masih kurang 24 orang, tenaga ATLM Puskesmas masih kurang 3 orang Untuk pelayanan ODGJ Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) untuk Puskesmas masih kurang 23



buku, tenaga dokter masih kurang 1 orang, Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa di Puskesmas masih kurang 22 orang Untuk pelayanan kesehatan orang dengan terduga TB alat tuberkulin masih kurang 23 orang, tenaga radiografer masih kurang 5 orang, tenaga ATLM di Puskesmas masih kurang 3 orang Untuk pelayanan orang dengan risiko HIV jumlah dokter penyakit dalam masih kurang 7 orangJumlah dan jenis tenaga kesehatan masih ada yang belum memenuhi standar pelayanan fasilitas kesehatan.

5. Perlu dilaksanakan moneyv SPM ditingkat Puskesmas dan Dinas Kesehatan
6. Pengadaan Mutu untuk Buku Rapor Kesehatan bagi anak pendidikan usia dasar tidak ada.
7. Stok Buku KIA Kosong, tidak ada drop dari pusat untuk tahun 2024.
8. Terjadi kekosongan Vaksin dari Pusat sehingga capaian Imunisasi dasar dan lanjutan masih sangat rendah.

1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Capaian Kinerja Outcome

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KET
3.	Pekerjaan Umum	Rasio Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi infra-struktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan SDA	
		Rasio Luas kawasan Permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yg terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kabupaten	13.132 %	14,808%		
		Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	73,824 %	3,884%		



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SUMBER DATA	KET
		Persentase jumlah Rumah Tangga yg mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan yang terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten	57,566 %	61,030%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tata Ruang dan Cipta Karya	
		Persentase jumlah Ru-mah Tangga yg memper-oleh layanan pengolahan air limbah domestik	76,728 %	0,963%		
		Rasio Kepatuhan IMB	100 %	100%		
		Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	68,079 %	34,249%		
		Rasio tenaga Operator/ teknisi/analisis yg memiliki sertifikat Kompetensi	100 %	3,650%		
		Rasio Proyek yg menjadi kewenangan pengawas-annya tanpa kecelakaan konstruksi	97,368 %	100%		

B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Persentase
Pendaptan Asli Daerah	175.000.000,00	160.341.562,00	91,62
Belanja Daerah	267.896.948.926,00	266.547.119.221,80	95,50

A. Permasalahan Yang Dihadapi

Keadaan geografis yang luas dan anggaran yang kecil menjadi faktor utama capaian urusan pekerjaan umum belum maksimal.

1.4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

A. Capaian Kinerja Outcome

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SUMBER DATA	KET
4.	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100	100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tata Ruang dan Cipta Karya	



NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SUMBER DATA	KET
		Fasilitasi Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kabupaten	0	100%		
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha dikabupaten yang ditangani	63,854 %	75,997%		
		Berkurangnya Jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni	20,994 %	17,401%		
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU	1,008	53,640%		

B. Realisasi Anggaran Belana Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Persentase
Pendaptan Asli Daerah	70.000.000,00	77.940.000,00	111,34
Belanja Daerah	16.135.226.060,00	15.758.387.477,00	97,66

C. Permasalahan Yang Dihadapi

1. Belum ada dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) sehingga pengumpulan data perumahan di lokasi rawan bencana berdasarkan laporan dari masyarakat desa bukan berdasarkan peta rawan bencana yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Kapuas Hulu secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut: 1. Belum berjalan secara optimal penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program pemerintah disebabkan oleh keterbatasan lahan; dan 2. Tingginya harga lahan dalam upaya penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah.

3. Pelaksanaan SPM bidang Perumahan sering terjadi tumpang tindih antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup dan BPBD

1.5. Urusan Ketenteraman Umum dan perlindungan Masyarakat

A. Capaian Kinerja Outcome

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SUMBER DATA	KET
1.	Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	persentase gangguan Tantribum yang diselesaikan	100 %	100%	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Persentase PERDA dan PERKADA yg ditegakkan	100 %	100%		
		Jumlah warga negara yg memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Jumlah warga negara yg memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0,466	0,010		
		jumlah warga negara yg memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	99,99		
		persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	100%		
		waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	4,78	9,6%		

B. Realisasi Anggaran Belanja pada urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Persentase
Satpol PP			
Belanja Operasi	10.268.518.976,00	9.941.825.927,00	95,80
BPBD			
Belanja operasi	5.318.007.720,00	5.145.172.920,00	96,75

C. Permasalahan Yang Dihadapi

1. Terkendalanya data dukung dari pihak desa/kecamatan dalam menyampaikan kembali Form permintaan data kebencanaan

2. Terbatasnya Anggaran dan Pelatihan SDM yang memadai dan sesuai dibidang kebencanaan
3. Belum optimalnya SDM sesuai dengan standar kualifikasi aparatur kebakaran dan penyelamatan
4. Keterbatasan SDM, sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan Kebencanaan

1.6. Urusan Sosial

A. Capaian Kinerja Outcome

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SUMBER DATA	KET
1.	Sosial	Persentase penyandang disabilitas, anak, dan lanjut usia terlantar dan gepeng yg terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	57,699 %	72,104	Dinas Sosial, Pemberdaya-an Perempuan dan Perlindungan Anak,	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab.	0,417 %	0,0747		

B. Realisasi Belanja urusan Sosial di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	Persentase
Belanja Daerah	3.737.043.160,00	3.605.275.695,00	96,47

C. Permasalahan Yang Dihadapi

1. pengumpulan data belum maksimal karena anggaran tidak cukup untuk membiayai petugas ke lapangan
2. Terbatasnya SDM di bidang sosial yang hanya 5 orang saja, sehingga tidak dapat maksimal dalam pendataan
3. Tidak ada Gelandangan, pengemis dan orang terlantar
4. Sulitnya mendapatkan data dari desa karena jaringan komunikasi yang tidak ada dan lokasi desa yang sulit dijangka



5. Tidak ada pekerja sosial profesional untuk membantu pendataan dan penjangkauan
6. Alokasi anggaran dari daerah tidak mencukupi
7. Tidak ada Gelandangan, pengemis dan orang terlantar
8. lokasi Desa yang jauh dan memerlukan biaya transportasi yang besar 2.sulitnya mendapatkan data dari desa 3.jaringan telepon tidak menjangkau semua desa sehingga sulit untuk berkomunikasi

2. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

A. Hasil EPPD Tahun 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023, Kabupaten Kapuas Hulu mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja 2,6708 dengan status kinerja sedang.

B. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023, Kabupaten Kapuas Hulu berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023. Untuk opini tahun 2024 belum rilis dari Badan Pemeriksa Keuangan.

IV. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu (An Audited) Tahun 2024 diperoleh Realisasi Pendapatan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 sebesar Rp. 1.828.699.963.740,60 dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024 sebesar 1.841.129.087.624.11.



TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH BERDASARKAN JENIS REKENING TAHUN 2024

Rekening	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
PENDAPATAN DAERAH			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	91.022.597.185,00	91.118.783.151,30	100,11
▪ Pajak Daerah	28.582.028.907,00	26.579.810.709,77	92,99
▪ Retribusi Daerah	5.846.790.164,00	6.838.706.850,00	116,97
▪ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.074.176.833,00	17.074.176.833,76	100,00
▪ Lain-lain PAD yang Sah	39.519.601.281,00	40.626.088.757,77	102,80
PENDAPATAN TRANSFER	1.749.848.934.053,00	1.725.393.389.411,00	98,60
▪ Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.677.344.986.137,00	1.669.669.184.369,00	99,54
▪ Pendapatan Transfer Antar Daerah	72.503.947.916,00	55.724.205.042,00	76,86
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.549.137.823,00	12.187.791.178,30	105,53
▪ Pendapatan Hibah	760.287.012,00	1.695.763.309,30	223,04
▪ Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan	10.788.850.811,00	10.492.027.869,00	97,25
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.852.420.669.061,00	1.828.699.963.740,60	98,72

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA DAERAH BERDASARKAN JENIS REKENING TAHUN 2024

Rekening	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
BELANJA DAERAH			
BELANJA OPERASI	1.231.042.283.866,00	1.197.437.635.464,01	97,27
▪ Belanja Pegawai	641.303.597.728,00	627.586.688.650,00	97,86
▪ Belanja Barang dan Jasa	409.944.412.644,00	392.724.864.855,72	95,80
▪ Belanja Subsidi	0,00	0,00	
▪ Belanja Hibah	179.363.873.494,00	176.696.231.208,29	98,51
▪ Belanja Bantuan Sosial	430.400.000,00	429.850.750,00	99,87
BELANJA MODAL	282.608.445.259,00	279.297.518.111,10	98,83
▪ Belanja Modal Tanah	280.000.000,00	240.000.000,00	85,71
▪ Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.096.853.208,00	35.193.168.507,00	103,22
▪ Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.433.483.006,00	70.599.092.543,10	93,59
▪ Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	162.936.781.705,00	162.383.698.082,00	99,66
▪ Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.536.327.340,00	10.556.710.339,00	110,70
▪ Belanja Modal Aset Lainnya	325.000.000,00	0,00	
BELANJA TIDAK TERDUGA	2.787.122.449,00	933.056.277,00	33,48
▪ Belanja Tidak Terduga	2.787.122.449,00	933.056.277,00	33,48
BELANJA TRANSFER	363.969.976.000,00	363.460.877.772,00	99,86
▪ Belanja Bagi Hasil	3.465.570.000,00	3.119.275.000,00	90,01



Rekening	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
▪ Belanja Bantuan Keuangan	360.504.406.000,00	360.341.602.772,00	99,95
JUMLAH BELANJA DAERAH	1.880.407.827.574,00	1.841.129.087.624,11	97,91

V. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program yang telah dilaksanakan. Beberapa program yang belum mencapai target akan mendapatkan perhatian lebih lanjut pada tahun 2025 dengan melakukan penyesuaian anggaran dan perbaikan sistem pelaksanaan.

VI. Penutup

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program yang lebih transparan dan akuntabel.

Menjadi harapan kami laporan ini dapat memberikan informasi yang jelas tentang kinerja pemerintah daerah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.